

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Pembangunan Daerah

- a. Proses perumusan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang adalah Musrenbang Desa/Kelurahan; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan RPJM Desa dan permasalahan yang sedang dihadapi. Musrenbang Kecamatan; memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan di tiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum. Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan fungsi dan Rencana Kerja tiap-tiap SKPD. Musrenbang RKPD Kabupaten; merupakan penetapan arah kebijakan pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas kegiatan ditingkat kecamatan dan Rencana kerja masing-masing SKPD berupa penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

b. Dalam proses perumusan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah; Adanya Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, serta Komitmen pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat proses Pembangunan daerah antara lain adalah; Penyesuaian/kesiapan anggaran, Usulan yang terlalu banyak, serta Keterbatasan dokumen penunjang.

2. Dalam Pembangunan Nasional

a. Proses pemerintah dalam pembangunan nasional dapat dilihat dalam Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antar waktu, sektor, wilayah maupun antar tingkat/fungsi pemerintahan, Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional, Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan, Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan, Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

b. Dalam proses perumusan pemerintah dalam perencanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses

tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah, Penyempurnaan ketatalaksanaan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah, Peningkatan-Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya, Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas, Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building), Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya, Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

B. Saran

Adapun hal-hal yang perlu disarankan sesuai dengan temuan penelitian, adalah :

1. Dalam pembangunan daerah
 - a. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan Musrenbang sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah tanpa hanya sekedar menjalankan kegiatan administratif dan seremonial dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, demi tercapainya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran.

b. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, agar senantiasa memperhatikan dan meminimalisir kekurangan yang menjadi penghambat berjalannya proses tersebut, sehingga dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan berikutnya dapat berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

2. Dalam Pembangunan Nasional

a. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebaiknya lebih memperhatikan opini publik, dikarenakan masyarakat lebih mengerti apa yang menjadi kendala pembangunan saat ini.